

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Dinas Perekonomian dan Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang ekonomi Kota Bandung. Yang mempunyai Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

2.1.1 Visi Perusahaan

Visi menurut Aditya (2010) merupakan suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang.

Misi menurut Wibisono (2006) merupakan penetapan sasaran atau tujuan perusahaan dalam jangka pendek (biasanya 1-3 bulan).

Visi Perusahaan “Mewujudkan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Profesional, Responsif dan Berorientasi Pelayanan Publik dalam Rangka Mendukung Perwujudan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :

a. **Profesional**

Profesional, artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi, seperti kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku

yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.

b. Responsif

Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

c. Pelayanan publik (*customer service*)

Secara umum pelayanan publik (*customer service*) diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan harapan (*expectation*) masyarakat.

2.1.2 Misi Perusahaan

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi, maka Sekretariat Daerah Kota Bandung merumuskan 3 (tiga) misi yang menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai unsur staf yang menentukan kualitas kebijakan serta efektivitas dan efisiensi sumber daya aparatur, serta sarana dan prasarana. Sehingga setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan
2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta di dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan otonomi Daerah dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat

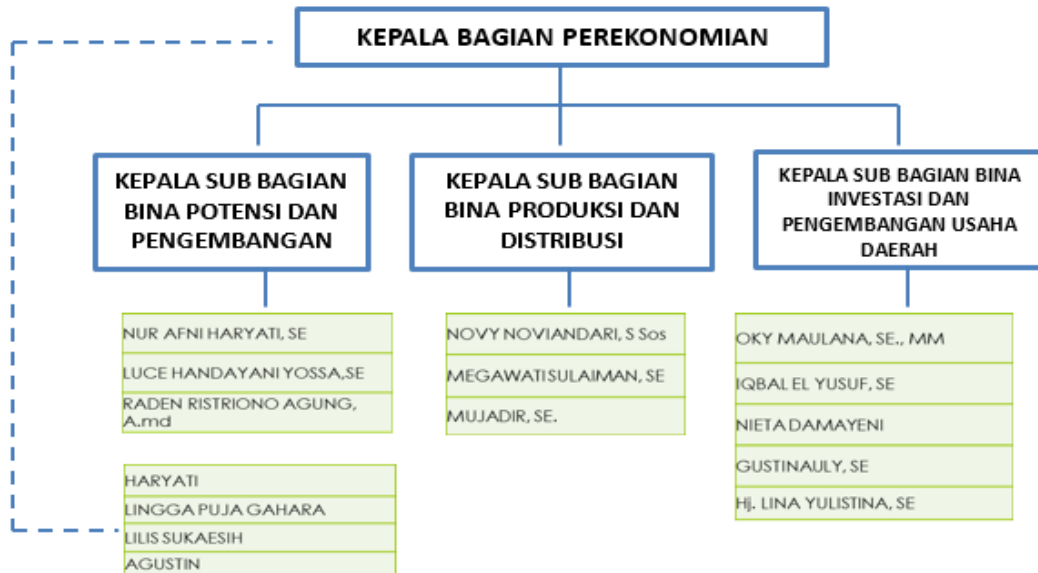
3. Objektif, yaitu dalam melakukan perumusan kebijakan didasarkan atas permasalahan dan data sehingga perumusan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada perangkat Daerah harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada perangkat Daerah.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi menurut Robbins dan Coulter (2007) dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka

kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokan, dan dikoordinasikan.



Sumber : <https://portal.bandung.go.id>

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1376 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung, Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas asisten Perekonomian dan Pembangunan lingkup Perekonomian. Bagian Perekonomian terdiri dari Kepala Bagian dan Sub Bagian.

- a. Kepala Bagian Perekonomian
- b. Kepala Sub Bagian Bina Potensi Dan Pengembangan
- c. Kepala Sub Bagian Bina Produksi Dan Distribusi
- d. Kepala Sub Bagian Bina Investasi dan Pengembangan Usaha Daerah

2.3 Deskripsi Jabatan

Menurut Stone (2005) job description atau deskripsi pekerjaan merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan ada, apa yang dilakukan pemegang pekerjaan sebenarnya, bagaimana mereka melakukannya dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Deskripsi pekerjaan atau deskripsi jabatan diciptakan untuk para pegawai mengetahui deskripsi pekerjaan masing-masingnya agar tidak terjadinya pembiasan tujuan perusahaan.

Adapun deskripsi tugasnya masing-masing sesuai struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung Bagian Ekonomi, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bagian

Dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1376 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung pada Paragraf 1 Bagian Perekonomian Pasal 23 menjelaskan bahwa kepala bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas asisten perekonomian dan pembangunan lingkup perekonomian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala bagian perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a.** penyelenggaraan perumusan perencanaan teknis operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;

- b.** penyelenggaraan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan
- c.** penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;
- d.** penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan umum lingkup Bagian Perekonomian yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;
- e.** penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;
- f.** penyelenggaraan pembinaan administrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;
- g.** penyediaan data, informasi dan pertimbangan dalam sistem pendukung keputusan serta kebijakan umum lingkup Bagian Perekonomian yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan dan perikanan;

- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Sub Bagian

A. Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing

Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Perekonomian lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing;
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing;
- c) Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing;
- d) Pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi

Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Perekonomian lingkup bina produksi dan distribusi. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan bahan kebijakan teknis operasional lingkup bina produksi dan distribusi;
- b) pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bina produksi dan distribusi;
- c) pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup bina produksi dan distribusi;
- d) pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bina produksi dan distribusi; dan
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Bina Investasi dan Pengembangan Usaha Daerah

Kepala Sub Bagian Bina Investasi dan Pengembangan Usaha Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Perekonomian lingkup bina investasi dan pengembangan usaha Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional lingkup bina investasi dan pengembangan usaha daerah;

- b) Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bina investasi dan pengembangan usaha daerah;
- c) Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup bina investasi dan pengembangan usaha daerah;
- d) Pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bina investasi dan pengembangan usaha daerah; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Dalam rangka perekonomian dan secretariat daerah Kota Bandung agar sesuai dengan aturan yang berlaku, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sub bagian bina produksi dan distribusi khususnya TPID kota Kota Bandung melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Penyusunan bahan, pengoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing, bina produksi dan distribusi, serta bina investasi dan pengembangan usaha daerah
2. Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing, bina produksi dan distribusi, serta bina investasi dan pengembangan usaha daerah.
3. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing, bina produksi dan distribusi, serta bina investasi dan pengembangan usaha daerah; pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan

lingkup bina potensi dan pengembangan daya saing, bina produksi dan distribusi, serta bina investasi dan pengembangan usaha daerah.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.